



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUL ALFIAN HADI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 714043

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	876.930.000
1. Tanah Seluas 331 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 175.430.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m2/90 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 400.500.000		
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 61.000.000		
4. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	186.000.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000		
3. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	36.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	463.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.562.330.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.562.330.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.